

ARTIKEL

ANALISIS STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH TERPADU BERBASIS MASYARAKAT DI KOTA SEMARANG

Cahyo, Suryaningsih, Lestari

Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

JL. Prof. Soedarto, SH Tembalang

ABSTRAKSI

Permasalahan sampah merupakan salah satu dampak negatif dari pesatnya pembangunan di Kota Semarang. Pesatnya pembangunan Kota Semarang diikuti dengan peningkatan jumlah penduduk yang berdampak pula pada volume sampah yang diproduksi. Peningkatan volume sampah tidak sebanding dengan sarana dan prasarana pengelolaan sampah di Kota Semarang. Mengacu UU Nomor 18 Tahun 2008 yang mengharuskan Pemerintah Kota/Kabupaten melakukan pengelolaan sampah, Kota Semarang menerapkan 2 strategi pengelolaan sampah yang dilakukan di hulu maupun hilir. Untuk tingkat hilir, bekerja sama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan sampah di TPA Jatibarang, sedangkan untuk tingkat hulu menerapkan pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat. Penerapan pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat belum efektif seperti yang diharapkan guna terciptanya *zero waste* di Kota Semarang. Kondisi tersebut menjadi latar belakang dalam penelitian ini.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kondisi pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat serta faktor apa saja yang mendukung dan menghambat yang dihadapi dalam penerapan pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat. Data yang didapat selanjutnya digunakan untuk merumuskan strategi alternatif yang dapat digunakan dalam pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat.

Untuk mengungkap permasalahan dan tujuan penelitian, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif analitik dengan menggunakan kajian manajemen strategis sebagai landasan dasar dalam menganalisis dan merumuskan strategi, serta kajian manajemen pengelolaan sampah sebagai indikator fenomena penelitian. Analisis data digunakan dengan menggunakan metode matriks SWOT dan uji Litmus.

Hasil penelitian yang ditemukan dilapangan menunjukkan bahwa faktor pendukung penerapan pengelolaan sampah terpadu meliputi adanya dukungan politik, baik dari DPRD Kota maupun Walikota dan keterlibatan *Stakeholder*. Faktor penghambat penerapan pengelolaan sampah terpadu meliputi belum adanya regulasi lokal yang menguatkan penerapan pengelolaan sampah, peran serta masyarakat bersifat pasif belum aktif terlibat dalam pemilahan sampah,

terkendala pemasaran hasil produksi, konsep swakelola tidak seperti yang diharapkan. Dari hasil uji litmus, isu strategis dalam pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat adalah meningkatkan kapasitas sumber daya dalam upaya mengubah persepsi, sikap, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Untuk menunjang keberhasilan pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat di Kota Semarang, berikut rekomendasi yang dapat diberikan, yaitu: meningkatkan koordinasi, komitmen, dan kerjasama pihak-pihak terkait, memperkuat regulasi lokal atau landasan hukum serta meningkatkan dukungan dari masyarakat.

Kata kunci: Strategi, Pengelolaan Sampah, Pemberdayaan

PENDAHULUAN

Pengertian sampah (UU No. 18 Tahun 2008) adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang padat. Menurut Adibroto (2004:1), “Sampah bukanlah sesuatu yang harus dibuang melainkan dapat diolah menjadi produk baru. Sampah juga tidak perlu berkonotasi kotor dan bau bila dikelola dengan baik.”

Di Kota Semarang, persampahan menjadi masalah yang sangat serius sebagai salah satu dampak negatif dari pesatnya pembangunan. Hal ini dapat dilihat dari semakin meningkatnya sampah dari tahun ke tahun. Berikut tabel jumlah penduduk dan produksi sampah di Kota Semarang.

Produksi Sampah Terangkut Kota Semarang

Tahun	Jumlah Penduduk	Produksi Sampah	
		m ³ /hari	m ³ /tahun
2005	1.419.478	2250	810.000
2006	1.434.025	2750	990.000
2007	1.454.594	3500	1.284.800

2008	1.481.640	4000	1.440.000
2009	1.506.924	4274	1.642.500

Sumber : *Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan BPS Kota Semarang, 2010*

Dari total diatas dapat dilihat bahwa produksi sampah tiap tahunnya terus bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Hal ini merupakan bukti bahwa produksi sampah memang berbanding lurus dengan pertumbuhan penduduk tiap tahunnya, sehingga membutuhkan penanganan yang optimal.

Dengan berlakunya UU No 18/2008 tentang pengelolaan sampah. Substansi penting dari UU ini adalah semua pemerintah kota/kabupaten harus mengubah sistem pembuangan sampah menjadi sistem pengelolaan sampah. Sampah yang biasanya diangkut dan dibuang ke TPA, saat ini harus ada pengelolaan sampah baik di tingkat hulu maupun hilir.

Di dalam menangani permasalahan sampah Pemerintah Kota Semarang dalam pengelolaan sampah menerapkan strategi yaitu untuk tingkatan hilir Pemerintah Kota Semarang bekerja sama dengan pihak ketiga (swasta) yaitu PT. Narpati Agung Karya Persada Lestari dalam pengelolaan sampah di TPA Jatibarang. Kerjasama ini berjangka waktu selama 25 tahun. PT. Narpati selaku pihak swasta yang mengelola sampah menjadi kompos di TPA Jatibarang belum berjalan optimal. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sugianto selaku pengelola PT. Narpati bahwa pihaknya saat ini hanya mampu mengelola 250 ton/hari dari total 350 ton/hari sampah yang masuk di TPA. Sisa sampah yang tidak terolah oleh PT. Narpati di pilah oleh pemulung yang ada di TPA Jatibarang

untuk dijual kembali. Namun, tidak semua sampah diambil oleh Pemulung, hal ini dikarenakan kualitas sampah itu sendiri. Untuk mengantisipasi *overload* TPA Jatibarang, pemerintah Kota Semarang menerapkan pengelolaan sampah terpadu di hulu.

Pengolahan sampah secara terpadu berbasis masyarakat dilaksanakan dengan melakukan reduksi sampah semaksimal mungkin dengan cara pengolahan sampah di lokasi sedekat mungkin dengan sumber sampah yaitu dapat dilakukan di Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS), transfer depo maupun di lokasi sekitar sumber sampah yang sesuai dengan kondisi setempat. Strategi ini sangat tepat karena pelayanan pengelolaan sampah di Kota Semarang belum maksimal. Hal ini terkendala oleh kemampuan sarana dan prasarana yang tidak sebanding dengan jumlah volume sampah yang dihasilkan.

Salah satu alternatif yang bisa dilakukan adalah melaksanakan program pengelolaan sampah berbasis masyarakat, seperti melaksanakan pengelolaan sampah dengan 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*). Program tersebut bisa dimulai dari sumber timbulan sampah hingga ke lokasi TPA. Pengelolaan sampah berbasis masyarakat (*Community Based Solid Waste Management / CBSWM*) adalah suatu pendekatan pengelolaan sampah yang didasarkan pada kebutuhan dan permintaan masyarakat, direncanakan, dilaksanakan, dikontrol, dan dievaluasi bersama masyarakat. Masyarakat harus bertanggung jawab terhadap sampah yang masyarakat produksi dan terlibat dalam penanganan sampah.

Penerapan pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat bertujuan untuk mengurangi volume timbulan sampah yang harus dibuang ke Tempat

Pembuangan Akhir (memperpanjang umur TPA), mengantisipasi penggunaan lahan tempat pembuangan akhir yang semakin terbatas, mengoptimalkan operasional sarana transportasi persampahan yang terbatas, mengurangi biaya pengangkutan sampah dari Tempat Pembuangan Sementara (TPS) ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), meningkatkan kemandirian masyarakat serta peran aktif masyarakat dalam mempertahankan kebersihan lingkungan melalui pengelolaan sampah yang ramah lingkungan. Diharapkan sampah sudah terolah dan berkurang pada tingkat kawasan Kecamatan, sehingga hanya residu sampah (sisa sampah yang benar-benar tidak dapat diolah) yang akan dibawa ke TPA Jatibarang.

Untuk menciptakan zero waste di Kota Semarang, Pemerintah Kota melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota merencanakan tiap kecamatan memiliki minimalnya satu unit tempat pengelolaan sampah terpadu. Namun, faktanya sejak dimulainya pada 2007, belum semua kecamatan memiliki tempat pengelolaan sampah terpadu. Hanya 10 Kecamatan yang sudah menerapkan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu dari 16 Kecamatan di Kota Semarang, yaitu Mijen, Pedurungan, Ngaliyan, Tugu, Candisari, Genuk, Semarang Selatan, Banyumanik, Gajah Mungkur, dan Semarang Utara.

Belum meratanya penerapan tempat pengelolaan sampah terpadu di tiap Kecamatan disebabkan oleh peran masyarakat dalam pengelolaan sampah. Peran serta masyarakat merupakan salah satu faktor penting untuk memecahkan permasalahan sampah di perkotaan. Sampai saat ini peran serta di tiap Kecamatan yang belum menerapkan tempat pembuangan sampah terpadu secara umum hanya

sebatas pembuangan sampah saja belum sampai pada tahapan pengelolaan sampah yang dapat bermanfaat kembali bagi masyarakat. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah yang paling sederhana dengan memisahkan sampah organik dan anorganik. Selain itu belum adanya kelompok swadaya masyarakat (KSM) yang berfungsi sebagai koordinator pengelola kebersihan lingkungan menjadi pemicu belum meratanya penerapan tempat pengelolaan sampah terpadu di tiap Kecamatan.

Namun, apakah hanya karena terkendala oleh peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah sehingga menyebabkan masih adanya Kecamatan yang belum menerapkan tempat pengelolaan sampah terpadu. Lalu bagaimanakah penerapan pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat selama ini. Apakah telah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Pemerintah Kota. Tentunya bila dibiarkan tanpa ada pemecahan ini bertentangan dengan apa yang diharapkan pemerintah guna terciptanya zero waste di Kota Semarang.

Atas dasar permasalahan yang telah dipaparkan, penulis merasa memiliki ketertarikan untuk meneliti dan mengkaji tentang kondisi sebenarnya dalam pengelolaan sampah di Kota Semarang. Di dalam penelitian ini penulis mengambil judul **“Analisis Strategi Pengelolaan Sampah Terpadu Berbasis Masyarakat Di Kota Semarang”**. Hal ini dilakukan agar permasalahan yang terkait dengan sampah bisa teratasi dan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat agar tercipta kualitas lingkungan hidup perkotaan yang lebih baik.

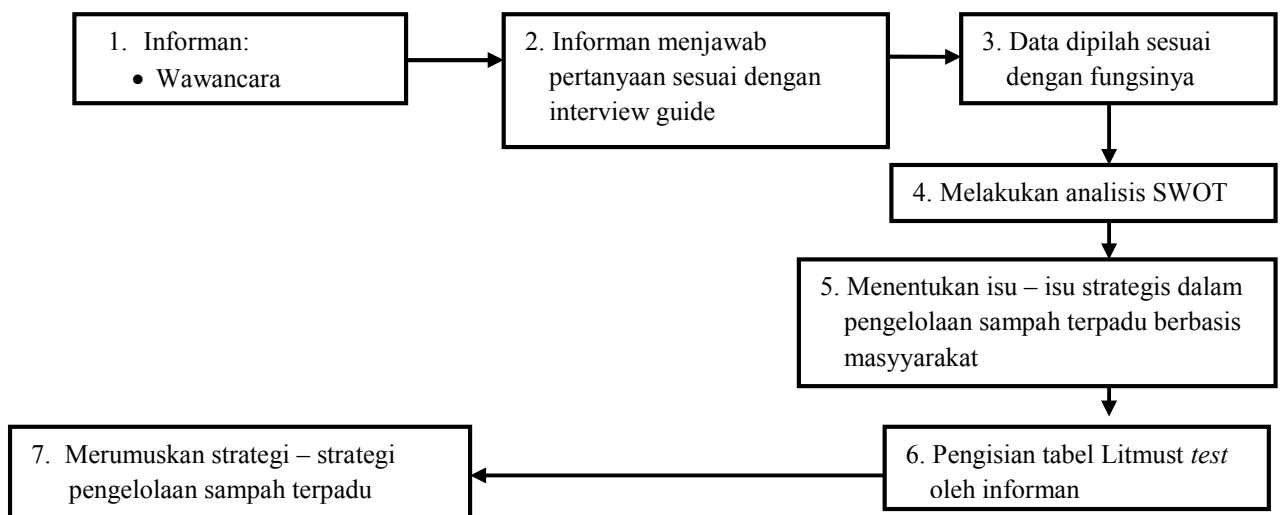
METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif analitik

dengan berfokus pada penerapan strategi pengelolaan sampah terpadu yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang. Di dalam pemilihan informan digunakan teknik *purposive sampling*, sedangkan Di dalam menggali informasi digunakan teknik *snowballing*. Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pegawai Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang yang berperan sebagai fungsi pelindung dan pendampingan dalam pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat di Kota Semarang.
2. Pegawai Badan Lingkungan Hidup yang berperan sebagai fungsi inisiatif dalam pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat di Kota Semarang
3. Para KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) yang berperan sebagai pelaksana program pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat.

Penelitian ini dirancang dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yang memanfaatkan metode kualitatif dengan Teknik analisis yang digunakan menggunakan metode matriks SWOT dan uji Litmus. Untuk memudahkan pemahaman maka peneliti membuat alur analisa data sebagai berikut:



PEMBAHASAN

Penerapan pengelolaan sampah terpadu di Kota Semarang dilatarbelakangi oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Kebijakan pengelolaan sampah muncul sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dialami oleh Pemerintah Kota/Kabupaten di Indonesia. Undang-Undang tersebut menekankan Pemerintah Kabupaten dan Kota dalam penanganan sampah tidak lagi menerapkan paradigma lama yaitu sampah dari sumber sampah diangkut ke TPS lalu di buang ke TPA tanpa ada pengolahan di sumber sampah. Untuk memotivasi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tersebut Pemerintah Pusat melalui Kementrian Lingkungan Hidup memberikan penilaian tertinggi bagi pemerintah Kabupaten dan Kota yang telah menerapkan pengelolaan sampah dalam lomba Adipura.

Sistem pengelolaan sampah terpadu yang diterapkan di Kota Semarang telah menerapkan system 3 R (*Reduce, Recycle, Reuse*). Dampak yang ditimbulkan dari pengelolaan sampah terpadu ini, meliputi : lingkungan menjadi bersih dan sehat, kondisi sosial ekonomi masyarakat di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu, serta pengurangan volume sampah yang dibuang ke TPA Jatibarang.

Pemilihan lokasi Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu yang dilakukan Dinas Kebersihan dan Pertamanan berdasarkan atas permintaan dari warga ataupun Kelurahan yang mengajukan proposal saat ada anggaran pengadaan barang. Seleksi dilakukan untuk mengetahui mana yang potensi betul-betul ingin mengolah sampahnya secara organik maupun anorganik bukan sekedar main-mainan. Berdasarkan data di bab sebelumnya bahwa penyebab 6 (enam) Kecamatan belum memiliki tempat pengelolaan sampah terpadu disebabkan oleh tidak adanya permintaan pengajuan permohonan bantuan saat ada pengadaan barang, karakteristik wilayah, dan terkendala anggaran untuk tahun ini.

Setelah kondisi penerapan pengelolaan sampah terpadu di Kota Semarang yang selama ini telah diketahui, selanjutnya melakukan analisis

lingkungan strategis. Analisis lingkungan strategis digunakan sebagai dasar dalam penentuan strategi pengelolaan sampah terpadu di Kota Semarang. Lingkungan strategis terdiri dari lingkungan internal dan eksternal yang nantinya mempengaruhi penerapan pengelolaan sampah terpadu. Menilai lingkungan internal dan eksternal bertujuan untuk mengidentifikasi apa saja yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada. Berikut analisis faktor lingkungan internal dan lingkungan eksternal berdasarkan hasil penelitian.

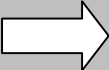

Penilaian Lingkungan	S	W	O	T
<u>Lingkungan Internal</u>				
a. Kelembagaan :				
- Kesesuaian visi dan misi dengan kondisi	√			
- Peran Kelurahan dalam membina masyarakat		√		
- Dukungan <i>stakeholder</i> dalam pengelolaan sampah terpadu	√			
- Wadah komunikasi		√		
b. Anggaran :				
- Pengelolaan penarikan iuran kebersihan non retribusi yang belum swakelola oleh para KSM		√		
- Penarikan iuran yang belum merata		√		
- Anggaran yang terbatas		√		
c. Teknik Operasional :				
- Sarana dan Prasarana yang menunjang	√			
- Uji laboratorium hasil komposting belum menjadi prioritas		√		
- Pemasaran hasil produksi		√		
Penilaian Lingkungan	S	W	O	T
<u>Lingkungan Eksternal</u>				
a. Hukum/Peraturan :				
- Belum adanya Perda turunan dari UU No 18 Tahun 2008 masih menggunakan Perda No. 6 Tahun 1993				√
- Perda turunan UU No. 18 Tahun 2008 sedang digodog			√	
- Ada dukungan dari Walikota dalam penerapan pengelolaan sampah terpadu			√	
- Kondisi lingkungan politik yang mendukung, terutama dalam alokasi anggaran oleh legislative dan usulan Perda baru inisiatif legaslatif			√	
b. Faktor Sosial Budaya :				
- Banyaknya animo masyarakat dalam pengajuan bantuan pengelolaan sampah terpadu			√	
- Kesadaran masyarakat untuk memilah dan mengelola sampah masih minim.				√

Sumber : *Data diolah*

Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal dapat diketahui apa saja yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Sehingga

setiap kelemahan (*weekness*) dan ancaman (*threat*) akan menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan strategi yang akan dirumuskan. Sementara kekuatan (*strength*) dan peluang (*oppurtinity*) akan menjadi faktor pendukung strategi yang akan dirumuskan dalam pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat di Kota Semarang.

Setelah melakukan analisis SWOT dan mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pengelolaan sampah terpadu di Kota Semarang, langkah selanjutnya adalah membuat matriks SWOT untuk menganalisis lebih lanjut strategi apa yang mungkin diambil dan dijadikan landasan dalam penetapan perencanaan strategis. Identifikasi ini menggunakan matriks SWOT yang terdiri dari 4 sel. Setiap sel akan menghasilkan strategi yaitu strategi SO, strategi ST, strategi WO, dan strategi WT. Hasil penelitian inilah yang akan digunakan untuk merumuskan alternatif strategi pengelolaan sampah.

<p style="text-align: center;">Faktor Internal</p>  <p style="text-align: center;">Faktor Eksternal</p> 	<p style="text-align: center;">STRENGTHS (S)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesesuaian visi dan misi dengan kondisi 2. Dukungan <i>Stakeholder</i> dalam pengelolaan sampah terpadu 3. Sarana dan prasarana yang menunjang 	<p style="text-align: center;">WEAKNESSES (W)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peran Kelurahan dalam membina masyarakat 2. Forum komunikasi 3. Pengelolaan penarikan iuran kebersihan non retribusi yang belum swakelola oleh para KSM 4. Penarikan iuran yang belum merata 5. Anggaran yang terbatas 6. Uji laboratorium hasil kompos belum menjadi prioritas 7. Pemasaran hasil produksi
<p style="text-align: center;">OPPORTUNITIES (O)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perda turunan UU No. 18 tahun 2008 sedang dirumuskan 2. Ada dukungan dari Walikota dalam penerapan pengelolaan sampah terpadu 	<p style="text-align: center;">STRATEGI S – O</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan sinergitas visi dan misi dalam dukungan politik 2. Meningkatkan dukungan <i>Stakeholder</i> dengan memanfaatkan dukungan Walikota 	<p style="text-align: center;">STRATEGI W – O</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membentuk wadah komunikasi/paguyuban dengan bantuan Walikota dan Legislatif 2. Mengoptimalkan peran Kelurahan guna mengatasi keterbatasan anggaran dalam Perda

3. Kondisi lingkungan politik yang mendukung, terutama dalam alokasi anggaran oleh legislative dan usulan perda baru inisiatif legislatif		turunan yang sedang dirumuskan 3. Mengkoordinir hasil produksi memanfaatkan dukungan Walikota
<p style="text-align: center;">THREATS (T)</p> 1. Belum adanya Perda turunan dari UU No. 18 tahun 2008, masih menggunakan Perda No. 6 Tahun 1993 2. Kesadaran masyarakat untuk memilah dan mengelola sampah masih minim	<p style="text-align: center;">STRATEGI S – T</p> 1. Memaksimalkan advokasi terkait visi dan misi yang ingin dicapai untuk meningkatkan kesadaran dan dukungan dari masyarakat dalam pengelolaan sampah terpadu.	<p style="text-align: center;">STRATEGI W – T</p> 1. Meningkatkan kapasitas Sumber daya dalam upaya mengubah persepsi, sikap, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah

Sumber : *Data diolah*

Setelah dirumuskan isu strategis maka tahap selanjutnya adalah evaluasi isu strategis. Pada tahap ini akan diukur tingkat kestrategisan isu agar dapat diketahui seberapa besar kontribusi isu tersebut terhadap eksistensi dan keberhasilan organisasi dalam upaya pencapaian tujuan, sebagai alat ukurnya dipergunakan alat uji litmus.

Setelah dirumuskan isu strategis maka tahap selanjutnya adalah evaluasi isu strategis. Pada tahap ini akan diukur tingkat kestrategisan isu agar dapat diketahui seberapa besar kontribusi isu tersebut terhadap eksistensi dan keberhasilan organisasi dalam upaya pencapaian tujuan, sebagai alat ukurnya dipergunakan alat uji litmus.

Untuk membantu proses pengukuran tingkat kestrategisan suatu isu, maka dibuat klasifikasi dan pemberian nilai bobot untuk masing-masing jawaban dengan kriteria sebagai berikut :

1. Jawaban yang sifatnya strategis diberikan nilai bobot 3.
2. Jawaban yang sifatnya moderat diberikan nilai bobot 2.

3. Jawaban yang sifatnya operasional diberikan nilai bobot 1.

Berdasarkan pada keempat kelompok isu strategis di atas, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis utama pengelolaan sampah terpadu di Kota Semarang adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan sinergitas visi dan misi dalam dukungan politik
2. Meningkatkan dukungan *stakeholder* dengan memanfaatkan dukungan Walikota
3. Memaksimalkan advokasi terkait visi dan misi yang ingin dicapai untuk meningkatkan kesadaran dan dukungan dari masyarakat dalam pengelolaan sampah terpadu
4. Membentuk wadah komunikasi/paguyuban dengan bantuan Walikota dan Legislatif
5. Mengoptimalkan peran Kelurahan guna mengatasi keterbatasan anggaran dalam perda turunan yang sedang dirumuskan
6. Mengkoordinir hasil produksi memanfaatkan dukungan Walikota
7. Meningkatkan kapasitas sumber daya dalam upaya mengubah persepsi, sikap, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah

Untuk mengetahui penilaian dalam uji litmus dapat dilihat dalam tabel berikut ini

No.	Isu Strategis	Skor Pertanyaan Tes Litmus											Total Skor		
		1	2	3	4					5	6	7		8	9
					a	b	c	d	e						
1.	Mengoptimalkan sinergitas visi dan misi dalam dukungan politik	1	2	1	1	1	1	1	1	1	3	2	3	1	19
2.	Meningkatkan dukungan <i>Stakeholder</i> dengan memanfaatkan dukungan Walikota	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	16
3.	Memaksimalkan Advokasi terkait visi dan misi yang ingin dicapai untuk meningkatkan kesadaran dan dukungan dari masyarakat dalam pengelolaan sampah terpadu	2	2	1	1	1	1	1	3	1	1	1	3	3	21
4.	Membentuk wadah komunikasi/paguyuban dengan bantuan Walikota dan Legislatif	2	2	2	1	1	1	3	1	2	3	1	2	2	23
5.	Mengoptimalkan peran Kelurahan guna mengatasi keterbatasan anggaran dalam perda rumusan yang sedang dirumuskan	2	1	1	1	3	3	1	1	2	1	2	1	2	21
6.	Mengkoordinir hasil produksi memanfaatkan dukungan Walikota	1	2	2	1	1	1	1	1	2	3	1	2	2	20
7.	Meningkatkan kapasitas sumber daya dalam upaya mengubah persepsi, sikap, perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah	3	3	3	3	3	3	1	3	2	3	3	2	3	35

Sumber : data diolah

Dari hasil skoring identifikasi isu strategis tersebut di atas, selanjutnya dibuat skoring untuk memprioritaskan isu-isu yang bersifat strategis, dengan rumusan sebagai berikut :

1. Isu yang bersifat Operasional = 1-13
2. Isu yang bersifat Moderat = 14-26
3. Isu yang bersifat Strategis = 27-39

Berikut klasifikasi 7 isu strategis yang telah diidentifikasi berdasarkan urutan prioritas, yaitu :

No.	Isu Strategis	Total Skor	Sifat Isu
1.	Meningkatkan dukungan stakeholder dengan memanfaatkan dukungan Walikota	16	Moderat
2.	Mengoptimalkan visi dan misi dalam dukungan politik	19	Moderat
3.	Mengkordinir hasil produksi kompos memanfaatkan dukungan Walikota	20	Moderat
4.	Memaksimalkan Advokasi terkait visi dan misi yang dicapai untuk meningkatkan kesadaran dan dukungan dari masyarakat dalam pengelolaan sampah terpadu	21	Moderat
5.	Mengoptimalkan peran Kelurahan guna mengatasi keterbatasan anggaran dalam Perda turunan yang sedang dirumuskan	21	Moderat
6.	Membentuk wadah komunikasi/ Paguyuban dengan bantuan Walikota dan Legislatif	23	Moderat
7.	Meningkatkan kapasitas sumber daya dalam upaya mengubah persepsi, sikap, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah	35	Strategis

Sumber : *data diolah*

Dari hasil klasifikasi isu strategis tersebut di atas, diketahui urutan prioritas penyelesaian dari masing-masing isu. Isu strategis yang memiliki skor paling tinggi adalah meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam upaya mengubah persepsi, sikap dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah. Isu tersebut perlu waktu dalam pelaksanaannya mengingat bersumber dari kelemahan dan ancaman.

Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan harus segera menindaklanjuti isu strategis yang bersumber dari kekuatan dan peluang (S-O) yang dimiliki yakni meningkatkan dukungan stakeholder dengan memanfaatkan dukungan Walikota. Hal ini berdasarkan pada hasil uji litmus yang menunjukkan isu tersebut mendapatkan skor paling rendah yang berarti paling mungkin untuk dilakukan dalam waktu dekat dan tidak membutuhkan biaya yang besar.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Penerapan pengelolaan sampah terpadu di Kota Semarang dilatarbelakangi oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Sistem pengelolaan sampah yang diterapkan telah mengacu pada 3 R (*Reduce, Reuse, Recycle*). Kebijakan tersebut mengharapkan masyarakat bertanggungjawab atas sampah hasil perbuatannya sehingga diharapkan dari rumah tangga ke TPS sudah *zero waste* karena sudah habis di rumah tangga masing-masing

Pemilihan lokasi tempat pengelolaan sampah terpadu yang dilakukan Dinas Kebersihan dan Pertamanan berdasarkan atas permintaan dari warga ataupun Kelurahan yang mengajukan proposal saat ada anggaran pengadaan barang. Pengajuan pengolahan sampah organik, selain mengajukan permohonan diharuskan memiliki lahan untuk ditempati bangunan agar tidak mengganggu lingkungan dikarenakan operasi mesin pencacah menimbulkan suara bising, sehingga tidak ada yang

dirugikan akan keberadaan TPST. Masih adanya Kecamatan yang belum memiliki tempat pengelolaan sampah terpadu dikarenakan 2 faktor, pertama karena karakteristik wilayah, kedua, terkendala pelibatan masyarakat dalam pengajuan permohonan.

Dampak yang ditimbulkan dalam penerapan sistem pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat, antara lain: lingkungan menjadi bersih dan sehat, kondisi sosial ekonomi masyarakat di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu, dan pengurangan volume sampah yang dibuang ke TPA.

2. Faktor – faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam penerapan pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat di Kota Semarang, yaitu ; Faktor pendukung dalam penerapan pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat di Kota Semarang, meliputi kesesuaian visi dan misi dengan kondisi, dukungan *Stakeholder* dalam pengelolaan sampah terpadu, sarana dan prasarana yang mendukung, sedang dirumuskan Perda turunan UU No. 18 Tahun 2008, ada dukungan dari Walikota dalam penerapan pengelolaan sampah terpadu, kondisi lingkungan politik yang mendukung, terutama dalam alokasi anggaran oleh Legislatif dan usulan Perda baru inisiatif legislatif, serta banyaknya animo masyarakat dalam pengajuan bantuan pengelolaan sampah terpadu.

Faktor yang menjadi penghambat penerapan pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat di Kota Semarang, meliputi minimnya peran Kelurahan dalam membina masyarakat, belum adanya wadah komunikasi,

pengelolaan penarikan iuran kebersihan non retribusi yang belum swakelola oleh para KSM, penarikan iuran yang belum merata, anggaran yang terbatas, uji laboratorium hasil komposting belum menjadi prioritas, pemasaran hasil produksi, belum adanya Perda turunan dari UU No 18 Tahun 2008 selama ini masih menggunakan Perda No. 6 Tahun 1993, dan kesadaran masyarakat untuk memilah dan mengelola sampah masih minim.

3. Isu – isu strategis dalam pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat di Kota Semarang meliputi, mengoptimalkan sinergitas visi dan misi dalam dukungan politik serta meningkatkan dukungan *Stakeholder* dengan memanfaatkan dukungan Walikota; memaksimalkan advokasi terkait visi dan misi yang ingin dicapai untuk meningkatkan kesadaran dan dukungan dari masyarakat dalam pengelolaan sampah terpadu; membentuk wadah komunikasi/paguyuban dengan bantuan Walikota dan Legislatif; mengoptimalkan peran Kelurahan guna mengatasi keterbatasan anggaran dalam Perda turunan yang sedang dirumuskan serta mengkoordinir hasil produksi memanfaatkan dukungan Walikota; meningkatkan kapasitas Sumber daya dalam upaya mengubah persepsi, sikap, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Hasil uji tes litmus diketahui bahwa tidak ada strategi yang bersifat operasional, melainkan bersifat moderat dan strategis. Berikut hasil uji litmus tentang analisis strategi pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat di Kota Semarang; hasil strategis bersifat moderat,

meliputi meningkatkan dukungan stakeholder dengan memanfaatkan dukungan Walikota (16), mengoptimalkan visi dan misi dalam dukungan politik (19), mengkoordinir hasil produksi kompos memanfaatkan dukungan Walikota (20), memaksimalkan Advokasi terkait visi dan misi yang dicapai untuk meningkatkan kesadaran dan dukungan dari masyarakat dalam pengelolaan sampah terpadu (21), mengoptimalkan peran Kelurahan guna mengatasi keterbatasan anggaran dalam perda turunan yang sedang dirumuskan (21), serta membentuk wadah komunikasi/paguyuban dengan bantuan Walikota dan Legislatif (23). Hasil strategi bersifat strategis, yaitu meningkatkan kapasitas sumber daya dalam upaya mengubah persepsi, sikap, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah (35).

Isu strategis dengan skor paling tinggi adalah meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam upaya mengubah persepsi, sikap dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah. Isu strategis ini perlu mendapatkan prioritas, karena perlu waktu dalam pelaksanaannya. Bukan berarti isu yang mendapatkan skor rendah diabaikan. Isu yang mendapatkan skor paling rendah berarti paling mungkin untuk dilakukan dalam waktu dekat.

Rekomendasi

Pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat di Kota Semarang dapat dikatakan masih belum maksimal dikarenakan masih adanya kendala-kendala dalam penerapannya. Untuk menunjang keberhasilan pengelolaan sampah terpadu

berbasis masyarakat di Kota Semarang, berikut rekomendasi yang dapat diberikan:

a. Meningkatkan komitmen, koordinasi, dan kerjasama pihak terkait

Meningkatkan koordinasi, komitmen, dan kerjasama pihak-pihak terlibat dalam pengelolaan sampah terpadu agar strategi yang telah direncanakan dapat diterapkan dengan baik dan maksimal. Faktor ini adalah satu hal yang mutlak untuk diwujudkan dalam pengelolaan sampah terpadu. Perlu komitmen yang tinggi dari pemerintah untuk menyelesaikan masalah dalam pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat. Komitmen ini berwujud pada kesungguhan pemerintah dengan berperan secara maksimal.

Penanganan sampah tidak dapat ditangani sendiri oleh aktor. Butuh koordinasi yang maksimum dengan melibatkan berbagai aktor terkait. Terdapat hubungan yang saling menunjang dan melengkapi dari berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan sampah terpadu. Koordinasi yang dilakukan merupakan kondisi yang menopang untuk mewujudkan kerjasama yang baik antar pihak terkait. Komitmen yang tinggi, koordinasi yang maksimum serta kerjasama yang baik merupakan faktor yang menentukan dalam pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat di Kota Semarang.

b. Memperkuat regulasi atau landasan hukum

Memperkuat regulasi atau landasan hukum yang dapat memberikan legitimasi dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan untuk

mendukung upaya pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat di Kota Semarang. Setiap organisasi publik khususnya organisasi pemerintahan atau sering disebut birokrasi pasti membutuhkan regulasi atau landasan hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sampai saat ini belum adanya Peraturan Daerah turunan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Belum ada peraturan yang kuat dalam pengelolaan sampah mendasari belum maksimalnya penerapan pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat. Mengacu kepada Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah pasal 21 ayat 1 tentang pemberian insentif dan pasal 24 tentang kompensasi bahwa Pemerintah Kota Semarang menyalahi aturan tersebut. Diharapkan terjadi silang kontribusi antara pengelola sampah terpadu dengan Pemerintah Kota Semarang sebab keberadaan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu ini membantu Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang dalam pengangkutan sampah dari Tempat Pembuangan Sementara (TPS) ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Berjalannya proses perumusan Peraturan Daerah terkait pengelolaan sampah di Kota Semarang diharapkan dapat mendukung penerapan pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat.

c. Meningkatkan dukungan dari masyarakat

Meningkatkan dukungan masyarakat dengan melibatkan secara aktif dan memberikan ruang partisipasi yang lebih besar dalam proses-proses pemberdayaan. Dukungan dari masyarakat merupakan salah satu syarat

yang dibutuhkan oleh pemerintah sekaligus dapat mempengaruhi terhadap organisasi pemerintahan itu sendiri agar dapat menjalankan peran dan tugasnya. Partisipasi masyarakat merupakan faktor utama guna mendukung penerapan pengelolaan sampah terpadu. Masyarakat harus sadar bahwa sampah bukanlah urusan pemerintah dalam penanganannya melainkan juga urusan masyarakat karena sampah dihasilkan dari kegiatan masyarakat. Oleh karenanya masyarakat ikut bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah. Jangan sampai permasalahan sampah menjadi bom waktu karena minimnya ketelibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Damai, Damadi dan Sudikin. 2009. *Administratsi Publik*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo
- Mufiz, Ali. 2004. *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*. Semarang: Undip Press
- Handoko, T. Hani. 2003. *Manajemen*. Yogyakarta: Gajah Mada Press
- Bryson, John M. 1999. *Perencanaan Strategis bagi Organisasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- David, Fred R. 2009. *Strategic Management*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat
- Hunger, J. David dan Thomas L. Wheelen. 2001. *Manajemen Strategis*. Yogyakarta: Penerbit ANDI
- Nawawi, H. Hadari. 2005. *Manajemen Strategik Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press

- Purwanto, Iwan. 2007. *Manajemen Strategi*. Bandung: CV Yrama widya
- Salusu. 2005. *Pengambilan Keputusan Stratejik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*. Jakarta : Grasindo.
- Siagian, Sondang P. 2008. *Manajemen Stratejik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Soetomo. 2009. *Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zubaedi. 2007. *Wacana Pembangunan Alternatif; Ragam Perspektif Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media
- Syafrudin.2004. *Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat*. Prosiding Diskusi Interaktif Pengelolaan Sampah Terpadu. Semarang : Program Magister Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro
- Sudradjat, R. 2007. *Mengelola Sampah Kota*. Jakarta : Penebar Swadaya

Non Buku :

- Undang-Undang nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
- Hartono. 2011. Strategi Pengelolaan Sampah di Kabupaten Klaten. *Skripsi*. Universitas Diponegoro
- Ali Purnomo. 2011. Strategi Pemerintah dalam Pemberdayaan Para Penyandang HIV/AIDS (ODHA) di Kota Semarang. *Skripsi*. Universitas Diponegoro
- Faizah, *Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis Masyarakat (Studi Kasus: Kota Yogyakarta)*, <http://eprints.undip.ac.id/17313/1/faizah.pdf>. Diunduh pada tanggal 26 November 2011
- Bambang Riyatno, *Prospek Pengelolaan Sampah Nonkonvensional di Kota Kecil (Studi Kasus: Kabupaten Gunung Kidul)*,

http://eprints.undip.ac.id/16701/1/BAMBANG_RIYANTO.pdf. Diunduh
pada tanggal 26 November 2011

<http://narasibumi.blog.uns.ac.id>, diakses tanggal 26 November 2011

<http://www.wargahijau.org/>, diakses tanggal 26 November 2011